

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Kajian Empiris

Dalam landasan teori ini akan dibahas teori yang terkait dengan Teori Ekonomi Pembangunan, Teori Belanja Modal, Dan Teori Investasi Swasta.

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara garis besar, teori pembangunan dibagi dalam dua pendekatan. Pertama, pendekatan modernisasi, mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Kedua, pendekatan ketergantungan, yang mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development), ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world sytem theory). Pendekatan modernisasi lebih menekankan pada pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi (bersifat makro) sementara pendekatan kedua lebih menekankan pada pembangunan sebagai peningkatan kualitas hidup (bersifat mikro) (Nugroho dan Dahuri,2004:25).

Pengertian pembangunan merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Sejauh ini serangkaian pemikiran mengenai konsep pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik, hingga pembangunan

berkelanjutan. Pembangunan dapat diartikan sebagai (Nugroho dan Dahuri,2004:25): “suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.”

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Riyadi dan Bratakusumah (2005:47) mengemukakan, bahwa: ”konsep pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Hal ini memberi pengertian bahwa pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan laju pertumbuhan antara daerah, antar kota dan desa, antar sektor dan daerah, sebagaimana yang dinyatakan Arsyad (1999:108) bahwa :

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dan wilayah tersebut. Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat.

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk itu pemerintah daerah membuat strategi pembangunan ekonomi. Menurut Arsyad (1999:122), secara umum tujuan strategi pembangunan ekonomi adalah:

1. Mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang.
2. Mencapai stabilitas ekonomi daerah.
3. Mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.

Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah lebih untuk mencari kesempatan kerja bagi penduduk yang ada ketimbang menarik para pekerja baru. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha (misalnya: lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya). Hal ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat.

Salah satu program pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah adalah pembentukan daerah otonom. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah, baik sebagai upaya untuk percepatan pertumbuhan daerah maupun pemerataan pembangunan antar daerah. Pembangunan ekonomi menurut Meier dalam Kuncoro (2006:17) adalah: “suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang”.

Pernyataan Meier tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang diikuti kenaikan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusi pendapatan merupakan faktor penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi.

2.1.2 Teori Belanja Modal

Aktivitas ekonomi sektor pemerintah ditujukan oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Fungsi pemerintah berbeda dengan fungsi rumah tangga atau perusahaan swasta. Rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, dan kapital) yang dijual dipasar faktor produksi, dengan imbalan berupa: sewa/harga lahan, upah/gaji, bunga, laba yang kesemuanya merupakan penghasilan untuk dibelikan barang dan jasa di pasar barang.

Anggaran bagi negara atau daerah pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang karena dilaksanakan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah yang mencakup sisi penerimaan dan pengeluaran. Anggaran daerah merupakan realisasi kebijakan fiskal termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sehingga kebijakan penganggaran daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Melalui anggaran sebagaimana yang dikemukakan Mardiasmo (2004:25), bahwa: Daerah dapat melakukan supervisi dengan ketat dan pengendalian terhadap penggunaan

dana sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Belanja pemerintah yang tertuang dalam APBN/APBD mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah, apabila pemerintah sudah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Alokasi belanja pemerintah pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkusubroto (1997:171), model belanja modal pemerintahan adalah:

- a. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti: pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
- b. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peran investasi swasta sudah semakin besar.
- c. Pada tahap ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti: program kesejahteraan hari tua, program kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan otonomi daerah yang memungkinkan lahirnya prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran didaerahnya.

Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Sama halnya Menurut Munir (2003:36) juga menyatakan hal senada. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Pada dasarnya negara kita sebagai negara yang sedang berkembang terjadi hambatan dalam pembangunan, salah satunya adalah kekurangan modal seperti yang dikemukakan oleh Irawan dan Suparmoko (1992:181), “Perbaikan tingkat hidup secara terus menerus dalam waktu lama hanya dapat dijamin dengan ekspansi kapasitas produksi yang sebagian besar tergantung pada luasnya pembentukan modal. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada umumnya hanya terdapat di negara yang sebagian besar pendapatan nasionalnya di investasikan, untuk itu perlu dikembangkan dengan domestik saving.

2.1.3 Teori Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan menanamkan dana yang bersumber dari masyarakat atau pemerintah untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik, mendatangkan mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya. Penanaman modal bersumber dari masyarakat dapat berupa investasi swasta yang terdiri dari PMDN dan PMA, sementara penanaman modal yang bersumber dari pemerintah dinamakan belanja modal.

Sukirno (2000:366), berdasarkan teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan bahwa: “investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang pengeluaran-pengeluaran barang, modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk menggantikan dan terutama untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan.”

Sedangkan Menurut Suryana (2000:72), pengertian penanaman modal (investasi) adalah penanaman modal merupakan keharusan bagi pembangunan ekonomi terutama di negara-negara berkembang. Karena pada dasarnya modal merupakan faktor penting dalam pembangunan disamping faktor-faktor lainnya seperti skill, sistem pemerintah yang efisien, kesanggupan untuk menciptakan dan menggunakan teknologi dan corak sikap masyarakat. Semakin besar modal yang tersedia maka semakin cepat pembangunan ekonomi dilaksanakan.

Dana investasi pada umumnya bersumber dari tabungan, baik tabungan swasta maupun yang berasal dari pemerintah, dapat berupa tabungan domestik dan asing. Investasi swasta memegang peran penting dalam pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Beberapa ekonom berpendapat bahwa tabungan domestik swasta merupakan sumber dana kedua setelah tabungan pemerintah di dalam pembiayaan investasi.

Akan tetapi, menurut Arsyad (2004:148): “Terdapat banyak bukti bahwa tabungan swasta memainkan peran utama dalam menunjang pembentukan modal, dimana negara yang relatif menjadi lebih kaya, peran investasi swastanya pun cenderung makin besar”.

Sebagaimana pihak swasta, pemerintah juga merupakan salah satu pelaku ekonomi yang paling penting dalam perekonomian modern. Berbeda dengan investasi swasta yang cenderung bertujuan mencari keuntungan, investasi pemerintah didasarkan pada pertimbangan lain seperti penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan termasuk juga dalam perlindungan terhadap mutu lingkungan hidup.

Kegiatan investasi yang dilakukan investor akan menempatkan unsur ketidakpastian, investor tidak mengetahui dengan hasil yang diperoleh dengan investasi yang dilakukan. Dalam hal ini dibutuhkan keputusan investasi yang dilakukan investor atau perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan yang melakukan investasi.

Menurut Sukirno (2000:121), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni :

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi adalah arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik atau dengan kata lain investasi adalah jumlah yang dibelanjakan sektor usaha untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Investasi biasanya menempati proporsi yang relatif sedikit dari permintaan agregat, akan tetapi fluktuasi investasi menempati sebagian besar pergerakan siklus bisnis dalam PDB. Salah satu alasan mengapa negara-negara dengan pertumbuhan tinggi mereka mencurahkan bagian substansial dari output mereka ke dalam investasi.

Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (benefit) pada masa-masa yang akan datang.

Menurut Nasution (1996:111) dalam hal penanaman modal, investasi mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu :

1. Tingkat Bunga
2. Keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukan (return of investment)
3. Peningkatan aktivitas perekonomian
4. Kestabilan politik suatu negara

Melihat uraian yang dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa investasi memainkan peran sangat penting dalam masyarakat yang sedang membangun. Investasi bagaikan motor yang menggerakkan kehidupan perekonomian nasional, karena dengan pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan PDRB, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan.

Menurut Nordhaus dan Samuelson (2004:136), hal-hal yang mempengaruhi investasi adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Penjualan
Suatu kegiatan investasi akan memberikan tambahan hasil penjualan bagi perusahaan investor hanya bila investasi yang dilakukan membuat perusahaan mampu menjual lebih banyak. Bila pabrik-pabrik beroperasi di bawah kapasitas normalnya, maka perusahaan-perusahaan tidak begitu berkeinginan membangun pabrik baru, sehingga investasi rendah.
- b. Biaya
Dalam melakukan investasi menjadi salah satu penentu nilai investasi yang dilakukan. Biaya tersebut bisa dilihat dari besarnya biaya yang digunakan untuk memperoleh barang-barang modal, biaya yang digunakan dalam proses produksi, dan biaya-biaya lainnya.
- c. Ekspektasi
Keputusan investasi tergantung pada ekspektasi atau perkiraan akan situasi masa depan. Dunia usaha berusaha keras melakukan analisis investasi dan berusaha untuk memperkecil ketidakpastian investasi mereka. Berbagai kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah di masa depan juga menjadi salah satu hal yang diperkirakan untung ruginya bagi aktifitas ekonomi mereka dimasa depan sebelum diputuskan untuk melakukan investasi.

2.1.4 Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja (manpower) merupakan salah satu modal utama dalam faktor produksi, karena tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam proses produksi. Jumlah tenaga kerja suatu negara seringkali dikaitkan dengan jumlah penduduk dan angkatan kerja. pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional memiliki faktor positif dan negatif terhadap perekonomian. Demikian juga pertumbuhan penduduk akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap perekonomian tergantung pada perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut (Arsyad,1997:245).

Sedangkan konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik sesuai konvensi ILO (International Labor Organization) Nomor 138 membagi penduduk menjadi dua kelompok, yakni:

1. Penduduk usia kerja, adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja (PUK) atau disebut juga sebagai Tenaga kerja, dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
2. Penduduk bukan usia kerja, adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar disuatu negara sebenarnya tidak menjadi masalah bila didukung oleh ekonomi yang efektif,

karena dengan pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat termasuk didalam menyediakan kesempatan kerja.

Djojohadikusomo (1998:205), mendefinisikan Kesempatan Kerja yaitu:

“Pertambahan penduduk dan angkatan kerja di satu pihak dan laju serta arah investasi di pihak lain mempengaruhi perluasan kesempatan kerja dan pengangguran. Bertambahnya angkatan kerja mempengaruhi tingkat upah nyata maupun pembagian pendapatan masyarakat. Selain itu pertambahan penduduk dan angkatan kerja mempengaruhi tingkat tabungan dan tingkat investasi yang di perlukan masyarakat yang sedang membangun”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja timbul akibat adanya investasi dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja banyak yang ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduk serta laju angkatan kerja. Menurut Arsyad (1999:315) menyatakan bahwa dalam mengukur pertumbuhan kesempatan kerja, maka ukuran dasar yang dipakai adalah tenaga kerja yang diserap.

Menurut Suryati (2000:84) investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, memiliki pengaruh yang cukup besar pada penyerapan tenaga kerja, dimana terdapat hubungan yang positif antara investasi pemerintah maupun investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.1.5 Hubungan Belanja Modal dan Penyerapan Tenaga Kerja

Peran pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, dan ketersediaan air yang merupakan sumbangan utama pengeluaran pemerintah yang efisien untuk merangsang investasi sektor

swasta. Terkait hal ini, maka dalam jangka menengah panjang, belanja modal dapat mendorong intensitas kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dapat menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar..

Menurut Harrod-Domar (Mulyadi,2002:8) hubungan antara investasi pemerintah melalui belanja modal dengan penyerapan tenaga kerja bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Untuk mendukung kapasitas produksi yang besar tersebut tentu diperlukan tenaga kerja sehingga secara otomatis peluang penyerapan tenaga kerja akan terbuka sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi belanja modal pemerintah yang ditanamkan maka tingkat penyerapan tenaga kerja semakin besar.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus memperhitungkan aspek penyediaan pekerjaan. Dengan bekerja maka distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh penduduk. Belanja modal yang dialokasikan dengan pemanfaatan tenaga kerja dari pemerintah suatu daerah, sehingga dapat memberikan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Pekerjaan yang umumnya banyak melibatkan partisipasi masyarakat adalah pekerjaan perbaikan jalan, jembatan, dan pembangunan infrastruktur lainnya seperti rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintah, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam hal ini, kondisi geografis yang cukup berat sangat membutuhkan penggunaan tenaga kerja yang relatif besar. Misalnya, proses pembangunan jalan khususnya di wilayah pedalaman membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan

penggalan lahan cukup dalam. Secara umum, hal ini menyebabkan anggaran belanja yang semakin besar akan mendorong pemanfaatan tenaga kerja yang besar pula.

2.1.6 Hubungan Investasi Swasta dan Penyerapan Tenaga Kerja

Sumarsono (2000:103) menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak akan berjalan maksimal apabila mengesampingkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai produksi, upah, nilai investasi swasta, dan lain-lain. Upah, nilai produksi, investasi swasta yang secara terus meningkat akan membawa dampak positif pada penyerapan tenaga kerja. Sebab, dengan adanya peningkatan upah, nilai produksi, dan nilai investasi swasta tersebut para pengusaha akan berupaya untuk meningkatkan atau menambah jumlah unit usahanya sehingga dengan adanya penambahan unit usaha pengusaha secara otomatis akan menambah pula jumlah tenaganya (Subekti,2007).

Semakin banyaknya investasi swasta yang masuk maka secara otomatis akan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi, dalam hal ini maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja karena masuknya investasi swasta. Masuknya investasi swasta pada umumnya bersifat padat modal, misalnya dalam penggunaan alat berat untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini kebutuhan tenaga kerja menjadi berkurang. Selain itu, tenaga kerja yang dibutuhkan juga harus memiliki kualifikasi tertentu yang belum tersedia di suatu daerah.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Nurhazizah (2000) menganalisis “Pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua”. Tingkat pertumbuhan investasi swasta dalam negeri dan luar negeri di Provinsi Papua dari Tahun 1990-2004 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan pertahun untuk investasi swasta dalam negeri sebesar 55,37%, sedangkan investasi luar negeri dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 35,69%. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua dari tahun 1990-2004, dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 3,84%. Sedangkan rata-rata penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, sektor pertanian merupakan sektor yang terbesar dalam penyediaan lapangan kerja dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 73,86%.
2. Penelitian oleh Yamin (2005) mengenai “Peran pemerintah dalam belanja modal dan investasi swasta terhadap kesempatan kerja di Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi-Provinsi di wilayah timur Indonesia masih cukup besar mengingat antara setiap sektor pemerintah memiliki hubungan komplementer satu sama lain.
3. Penelitian oleh Rahayu (2004), Meneliti tentang “Dampak investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara” dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Peranan Pengeluaran pembangunan yang berasal dari investasi swasta di Kabupaten Tapanuli Utara lebih besar jika dibandingkan dengan peran pengeluaran yang berasal dari pemerintah dalam pembentukan output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Kebijakan desentralisasi fiskal berdampak terhadap semakin menurunnya investasi swasta dalam menciptakan output, pendapatan, dan tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara. Besarnya output, Pendapatan, dan Penyerapan tenaga kerja yang tercipta diakibatkan investasi swasta sebelum desentralisasi fiskal sebesar 90.91 persen, 91.76 persen, dan 82.32 persen, sedangkan sesudah desentralisasi fiskal berturut-turut 85.32 persen, 85.88 persen, dan 71.75 persen.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka proses berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan studi atas berbagai teori terkait dengan penelitian ini, dimulai dengan teori tenaga kerja, yang didukung dengan teori lain yaitu teori anggaran pemerintah, dan teori investasi (terutama teori investasi swasta) sebagai motor perekonomian. Teori-teori ini berguna sekali pada saat melakukan analisis atas berbagai hasil penelitian.

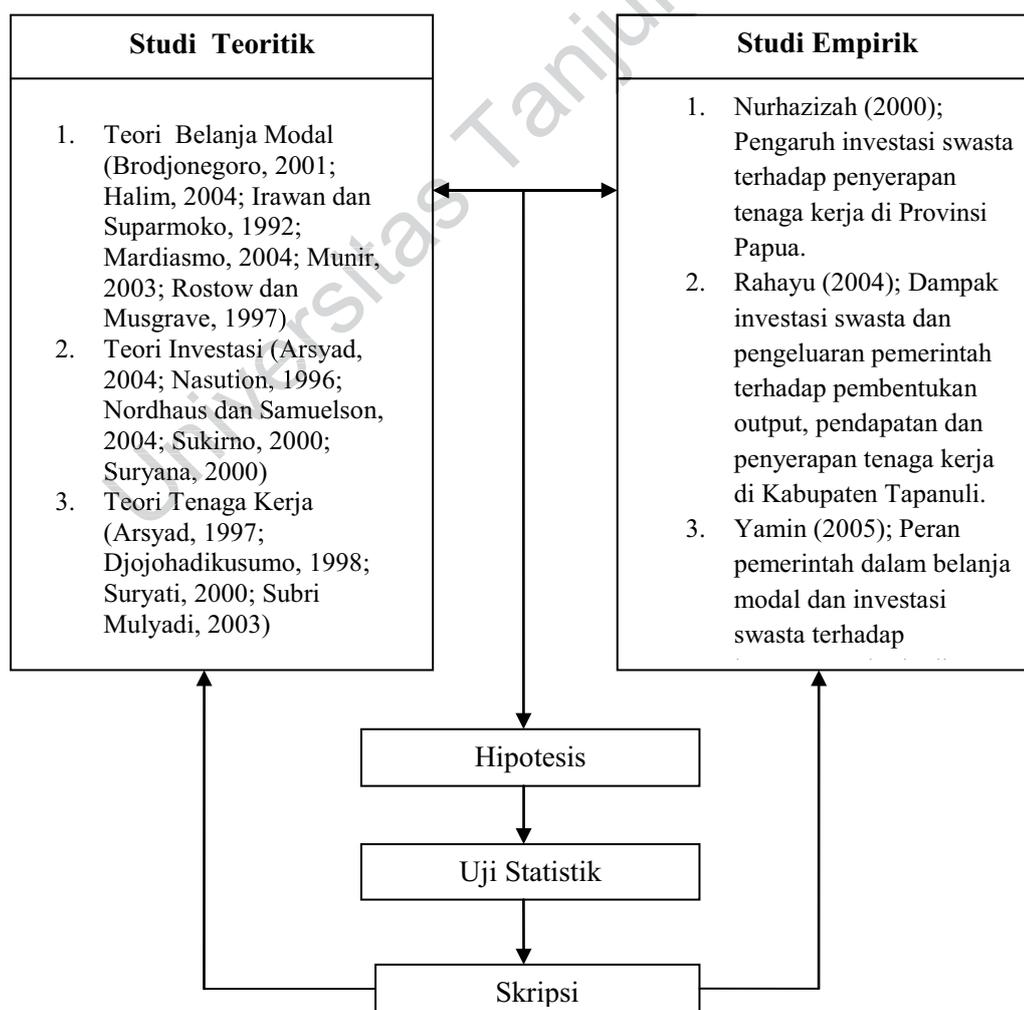
Berbagai teori tersebut bersifat universal tetapi dapat digunakan untuk keperluan prediksi atau peramalan atas kasus-kasus spesifik, karena berbagai teori tersebut mengikuti logika berpikir deduktif. Berbagai temuan teoritik akan

memberi kontribusi pada pengembangan teori atau pengembangan ilmu pengetahuan untuk memperkuat teori.

Sementara, studi empirik akan memberi tuntunan untuk berpikir secara induktif. Berbagai temuan empirik akan memberikan kontribusi terhadap hasil-hasil penelitian dan memberi rekomendasi untuk pengambilan kebijakan. Adapun kerangka proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Proses Berpikir



2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/ kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji. Secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : B_1 = 0$ Artinya tidak ada pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2013

$H_a : B_1 \neq 0$ Artinya ada pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2013